

Laporan Delegasi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dalam Rangka Menghadiri Sidang *The 1st Extraordinary Meeting of the PUIC Standing Specialized Committee of Political Affairs and Foreign Relations the Committee on Muslim Communities and Minorities*



26-27 MEI 2022

Ankara, Turkiye

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

DAFTAR ISI

- **PENDAHULUAN**
- **AGENDA SIDANG**
- **JALANNYA PERSIDANGAN**



Laporan
The 1st Extraordinary Meeting of the PUIC Standing Specialized Committee
of Political Affairs and Foreign Relations
the Committee on Muslim Communities and Minorities
Ankara, Turkiye 26-27 May 2022

Pendahuluan

Delegasi DPR RI yang terdiri dari Pimpinan BKSAP menghadiri rapat pembentukan Komisi untuk Komunitas dan Minoritas Muslim yang diadakan di Ankara, Turkiye secara fisik pada tanggal 26-27 Mei 2022. Pertemuan yang dilaksanakan di Ankara ini merupakan pertemuan lanjutan dari hasil Konferensi ke 16 PUIC, yang telah dilaksanakan di Istanbul pada tahun 2021 yang lalu. Tujuan dari pertemuan adalah untuk membahas rencana pembentukan Komisi untuk Komunitas dan Minoritas Muslim yang tinggal di negara-negara non anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam). Fokus bahasan dari pertemuan di Ankara adalah meminta pendapat dari delegasi yang hadir mengenai *draft rules of procedure* yang telah disiapkan oleh *rappporteur* untuk Komisi untuk Komunitas dan Minoritas Muslim. Agenda bahasan lainnya adalah mendengarkan tanggapan dari delegasi yang hadir mengenai isu-isu apa yang sebaiknya menjadi fokus penanganan Komisi tersebut. Delegasi yang hadir antara lain; Turkiye (sebagai tuan rumah), Iran, Aljazair, Maroko, Nigeria, Indonesia, Kuwait, Pakistan, Uganda, Palestina, Gabon dan Gambia. Pada pertemuan tersebut Indonesia terpilih menjadi anggota Komisi mewakili Kawasan Asia bersama-sama dengan Iran.

Komposisi delegasi DPR RI yang menghadiri pertemuan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Fraksi	Posisi
1	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng	PKS	Ketua Delegasi/Wakil Ketua BKSAP
2	Dr. H. Fadli Zon, M.Sc.	Gerindra	Anggota Delegasi/Ketua BKSAP
3	Putu Supadma Rudana, MBA	Demokrat	Anggota Delegasi/Wakil Ketua BKSAP
4	Ir. H. Achmad Hafisz Tohir	PAN	Anggota Delegasi/Wakil Ketua BKSAP

Susunan agenda adalah sebagai berikut:

AGENDA

26 MAY, 2022

MORNING SESSION 10:00-12:00

1. Election of the Rapporteur of the Committee.
2. Studying and approving the Rules of Procedure of the Committee on Muslim Minorities.
3. Election of the members of the Committee of Political Affairs and Foreign Relations according to the geographical distribution. Two members from each geographical group (Arab, Asian and African) for a period of one year. The members of the Troika (previous, current and future presidency) are ex officio members of the committee.

EVENING SESSION 18:00-19:00

4. Adoption of the Report of the Meeting.

AGENDA

27 MAY, 2022

MORNING SESSION 09:30-12:00

1. Election of the Rapporteur of the Committee.
2. Examination of Issues concerning Human Rights Violations of Muslim Minorities in non-PUIC member countries.

EVENING SESSION 18:00-19:00

3. Adoption of the Report of the Meeting.

Jalannya Pertemuan

1. Dalam sambutannya Ketua Delegasi Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng menyampaikan dukungan penuh Indonesia untuk pembentukan Komisi untuk Komunitas dan Minoritas Muslim di Negara-negara Non-OKI. Terutama dengan mengingat keaktifan Indonesia pada isu pelanggaran HAM yang terjadi pada kelompok minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. Disamping itu Ketua Delegasi juga menyampaikan fakta menarik mengenai pertumbuhan umat Muslim di negara-negara non anggota OKI, dimana secara statistik, populasi Muslim dunia kemungkinan akan meningkat secara signifikan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Forum Pew tentang Agama & Kehidupan Publik memproyeksikan pertumbuhan populasi Muslim dari 2010 hingga 2030, di mana 79 negara akan memiliki satu juta atau lebih penduduk Muslim pada

2030, naik dari 72 negara saat ini. Di Amerika Serikat, misalnya, proyeksi populasi menunjukkan jumlah Muslim lebih dari dua kali lipat selama dua dekade berikutnya, meningkat dari 2,6 juta pada tahun 2010 menjadi 6,2 juta pada tahun 2030. Sementara di Eropa, secara keseluruhan, pangsa Muslim dari populasi diperkirakan akan tumbuh hampir sepertiga selama 20 tahun ke depan, meningkat dari 6% penduduk kawasan itu pada 2010 menjadi 8% pada 2030.

2. Namun demikian, menurut Ketua Delegasi terlepas dari informasi yang optimistis tersebut, kita tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa banyak saudara-saudara Muslim kita yang tinggal di negara-negara non-OKI juga sering menjadi korban diskriminasi dan dalam kasus-kasus tertentu, pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa mengalami pelecehan verbal atau menjadi target ujaran kebencian, serangan kekerasan atau profil agama. Beberapa, memiliki pengalaman mengerikan seperti yang terjadi pada orang-orang Rohingya di Myanmar.
3. Oleh karena itu, menanggapi situasi tersebut, Ketua Delegasi menjelaskan bahwa bukan hanya karena kewajiban kita sebagai Muslim untuk membantu sesama Muslim, atau untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Tetapi juga, sebagai anggota parlemen, adalah bagian dari tugas parlemen kita untuk melakukan apa yang benar secara moral dan politik, dalam menanggapi situasi kemanusiaan semacam itu. Melalui diplomasi parlemen, anggota parlemen dari PUIC diharapkan dapat menjembatani dialog politik dengan sesama parlemen di negara-negara di mana Minoritas Muslim berada, untuk menghentikan pelanggaran, mendorong saling menghormati dan pengertian, juga untuk mempromosikan undang-undang dan kebijakan yang lebih baik yang memungkinkan perdamaian berkelanjutan.
4. Pada pembahasan mengenai *draft rules of procedure*, Delegasi Indonesia memberikan beberapa masukan sebagai berikut; Memberikan masukan pada paragraf mengenai tujuan pembentukan Komisi yaitu “Mempromosikan saling menghormati dan pengertian di antara agama dan budaya yang berbeda, untuk membangun ko-eksistensi damai yang berkelanjutan di negara-negara terkait.”
5. Sedangkan pada di sesi kedua yang berlangsung pada tanggal 27 Mei 2022 Ketua BKSAP, Dr. H. Fadli Zon, M.Sc. menyampaikan intervensi berisi ajakan kepada seluruh delegasi yang hadir agar melihat kembali kondisi Muslim Rohingya. Sejak terjadinya kekerasan skala besar dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius oleh militer Myanmar pada Agustus 2017, hingga saat ini, Rohingya masih dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Pandemi COVID-19 dan kudeta Februari oleh militer Myanmar, telah membuat prospek pemulangan Rohingya yang aman, bermartabat dan sukarela ke rumah mereka di Negara Bagian Rakhine menjadi tidak dapat dipertahankan.

6. Rezim militer Myanmar yang berkuasa saat ini adalah militer yang sama yang memberikan sanksi dan melakukan gelombang kekerasan terhadap Rohingya di masa lalu, termasuk yang terakhir pada tahun 2017. Sejak mengambil alih kekuasaan, militer Myanmar juga meragukan hak pengungsi Rohingya yang hidup di Bangladesh untuk pulang.
7. DPR RI melalui diplomasi parlemen telah konsisten dalam upaya menggalang dukungan politik bagi upaya kemanusiaan dan program pemulangan warga Rohingya melalui berbagai forum parlemen regional seperti Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
8. Namun, upaya tersebut tidak berhasil di AIPA karena proposal draft resolusi Indonesia tentang situasi kemanusiaan Rohingya gagal mencapai konsensus. Selama empat tahun berturut-turut, Myanmar selalu menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa ini adalah masalah dalam negeri yang tidak boleh diintervensi oleh negara lain. Padahal, *spillover effect* dari krisis kemanusiaan ini bisa berdampak ke seluruh kawasan Asia Tenggara.
9. Dari sisi bantuan kemanusiaan, pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan antara lain pada Desember 2019, dengan memberikan hibah senilai Rp 7,5 miliar untuk membantu pemulangan pengungsi Rohingya dari Cox's Bazar, Bangladesh, ke Rakhine, Myanmar. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Indonesia dalam membantu Rohingya.
10. Pada Juni 2020, pemerintah Indonesia juga telah menyediakan tempat tinggal sementara dan kebutuhan pokok bagi pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh utara. Keputusan ini didasarkan pada prinsip kemanusiaan karena mempertimbangkan kondisi para pengungsi yang sangat memprihatinkan. Hampir satu juta orang Rohingya, setelah melarikan diri dari rumah mereka di Negara Bagian Rakhine, saat ini tinggal di wilayah Cox Bazaar di Bangladesh yang kini menjadi kamp pengungsi terbesar di dunia. Demikian disampaikan oleh Ketua BKSAP.
11. Ketua BKSAP juga menyampaikan bahwa perkembangan situasi politik terbaru di Myanmar pasca kudeta oleh militer Myanmar semakin tidak menentu. Parlemen yang sah dibubarkan secara paksa dan banyak anggotanya dipaksa ke pengasingan. Kondisi ini membuat sulit untuk dapat mendorong kelanjutan program repatriasi bagi Muslim Rohingya. Ketua BKSAP menutup intervensinya dengan menyampaikan harapan agar Komisi untuk Komunitas dan Minoritas Muslim yang baru dibentuk tersebut dapat mempertimbangkan untuk menjadikan Muslim Rohingya sebagai salah satu fokus kerjanya di masa depan.

12. Kemudian pada sesi diskusi Ketua BKSAP juga memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk pengembangan kerja Komisi kedepan yaitu:

- a. Pembuatan *database* mengenai pelanggaran HAM terhadap umat Islam di seluruh dunia sebagai dasar penentuan kebijakan dan langkah yang akan diambil oleh Komisi, serta;
- b. Perlunya negara-negara PUIC untuk solid dan bersama-sama memperjuangkan emergency item mengenai Islamophobia pada sidang umum IPU mendatang di Kigali, Rwanda.

Sekretaris Jenderal PUIC Mouhamed Khouraiichi Niass dan *Rapporteur* Prof. Orhan Attalay menanggapi positif kedua rekomendasi tersebut dan berjanji akan mengelaborasi lebih jauh sebelum mengundang Delegasi yang hadir pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan ditutup dengan pengesahan laporan jalannya rapat.

====

DOKUMENTASI KEGIATAN



**Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Gedung Nusantara III, Lantai 6, Komplek MPR/ DPR/ DPD RI
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Telp. : 021-5715814

Faks. : 021-5715249

Email : ksr.bksapdpr@gmail.com | oprkbksap@yahoo.com



@bksapdpr



@bksapdpri



BKSAP DPRRI



BKSAP DPRRI



<http://ksap.dpr.go.id>